



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024**

**LARANTUKA
2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 memiliki arti strategis karena menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan semester pertama (Januari-Juni) tahun 2024 dan juga memuat rencana kerja dan pendanaan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2027.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam semester kedua (Juli-Desember) tahun 2024. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

Laranghaka, 26 Agustus 2024

Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur,



Antonius Lebaya, S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP.19651023 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	6
2.1. Evaluasi RENJA Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	6
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3. Isu – isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan	
Perangkat Daerah	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB IV PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	7
Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.....	25
Tabel II.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	
Kabupaten Flores Timur	29
Tabel III.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Inspektorat Daerah	
Kabupaten Flores Timur	44



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 269 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mencakup perubahan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada tahun 2024 dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.
 - Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
 - Bab IV : Penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).
- KEEMPAT : Dalam hal Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berbeda dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 maka yang digunakan adalah hasil Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sedangkan hal-hal yang tidak mengalami perubahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- KELIMA : Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- KEENAM : Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 20 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Inspektorat Kabupaten Flores Timur merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Flores Timur melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan barang/kekayaan milik daerah;
- d. Melakukan pengujian, penilaian dan evaluasi atas laporan setiap instansi di daerah;
- e. Melakukan pengusutan tentang kebenaran laporan pengaduan, penyimpangan dan penyalahgunaan;
- f. Melakukan analisis dan menyusun laporan serta melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pengawasan; dan
- g. melakukan kegiatan administrasi lainnya.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan Dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Ser E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
 15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
 16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 10.)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah:

- a. Memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II / semester pertama Tahun 2024; yang berkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan tahun 2024.
- b. Menjabarkan perubahan indikator kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan dan pagu indikatif kegiatan
- c. Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan dan pagu indikatif kegiatan

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan yang diharapkan adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan DPA Tahun 2025.
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan perubahan kegiatan Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan dengan memperhatikan dokumen Renstra 2023 – 2026 sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mulai tahun 2024 didasarkan pada Renstra 2023-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Adanya berbagai kendala eksternal maupun internal dalam pelaksanaan pengawasan menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan.

Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel II.1. berikut:

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi	UNIT PD		
								I		II		III		IV					
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8	10	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	01					INSPEKTORAT DAERAH	255	4.630.082.370	7	935.939.122	93,10	991.482.876	0	-	0	-	100,10	1.927.421.998	
6	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota		145	4.013.632.370	7	935.939.122	43	869.913.476	0		0		50,10	1.805.852.598	
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	238.400.000	3	6.900.000	22	81.658.459	0	-	0	-	25,10	88.558.459	
						Persetanse Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	31.000.000	0	-	6	11.860.930	0	-	0	-	6,00	11.860.930	
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100	40.000.000	0	-	2	34.985.202	0	-	0	-	2,00	34.985.202	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	3.704.232.370	4	929.039.122	13	741.408.885	0	-	0	-	17,00	1.670.448.007	
6	01	01	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
6	01	01	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000	-	-	1	4.610.000					1,00	4.610.000	
6	01	01	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	7.500.000	-	-	-	-					-	-	
6	01	01	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil	6	15.000.000	0	-	4	9.960.000					4	9.960.000	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10
					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)													
6	01	01	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000	-	-	1	3.000.000					1,00	3.000.000	
6	01	01	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	26	3.656.732.370	4	929.039.122	7	723.838.885	0	-	0	-	11	1.652.878.007	
6	01	01	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	44 /14	3.577.732.370	4	929.039.122	3	708.838.885					7	1.637.878.007	
6	01	01	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	79.000.000	-	-	4	15.000.000					4	15.000.000	
6	01	01	02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	-	-	-	-	0	-					-	-	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10
					Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)													
6	01	01	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang OPD (Laporan)	5	12.000.000	0	-	1	3.767.800	0	-	0	-	1	3.767.800	
6	01	01	03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD (Dokumen)	1	3.000.000	-		1	2.620.000					1,00	2.620.000	
6	01	01	03	05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000	-	-	-	368.800					-	368.800	
6	01	01	03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	2	4.000.000	-	-	-	779.000					-	779.000	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10
					SKPD	SKPD (Laporan)													
6	01	01	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Unsur Kapabilitas APIP (%)	11	55.000.000	0	-	4	37.485.202	0	-	0	-	4	37.485.202	
6	01	01	05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	10.000.000	-	-	2	2.500.000					2	2.500.000	
6	01	01	05	05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	5.000.000	-	-	-						-	-	
6	01	01	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	40.000.000	-	-	2	34.985.202					2	34.985.202	
6	01	01	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10
					Peraturan Perundang- Undangan	Peraturan Perundang- Undangan (orang)													
6	01	01	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang, Dokumen dan Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Disediakan (unit)	35	85.200.000	0	-	9,10	49.571.959	0	-	0	-	9,10	49.571.959	
6	01	01	05	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.000.000	0	-	0,34	676.000					0,34	676.000	
6	01	01	05	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	7.000.000	-	-	-	-					-	-	
6	01	01	05	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000	-	-	-	-					-	-	
6	01	01	05	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan	5	10.000.000	-	-	0,47	4.674.500					0,47	4.674.500	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10
					Logistik Kantor	Logistik Kantoryang Disediakan (Paket)													
6	01	01	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000	-	-	0,29	4.386.900,00					0,29	4.386.900	
6	01	01	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan (Paket)	12	1.200.000	-	-	2	300.000					2	300.000	
6	01	01	06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	-	-	-	-	-	-					-	-	
6	01	01	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	45.000.000	-	-	6	39.534.559					6	39.534.559	
6	01	01	06	11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	-	-	-	-	-	-					-	-	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8	10	
					Berbasis Elektronik pada SKPD	SKPD (Dokumen)													
6	01	01	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	-	--	---	-	-	-	-	
6	01	01	07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	-	--	---	-	-	-	-	
6	01	01	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	-	--	---	-	-	-	-	
6	01	01	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	-	--	---	-	-	-	-	
6	01	01	07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-	-	-	-	-	-	--	---	-	-	-	-	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10
					Bangunan Lainnya	Disediakan (Unit)													
6	01	01	07	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	-	-	-	-	-	--	---	-	-	-	-	
6	01	01	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	36	126.200.000	3	6.900.000	10	25.818.700	0	-	0	-	13	32.718.700	
6	01	01	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.200.000	0	-	2	489.000					2	489.000	
6	01	01	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	35.000.000	0	-	6	17.279.700					6	17.279.700	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10
6	01	01	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	90.000.000	3	6.900.000	2	8.050.000					5	14.950.000	
6	01	01	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara (unit)	18	31.000.000	0	-	6	11.860.930	0	-	0	-	6	11.860.930	
6	01	01	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	18.000.000	-	-	3	10.110.930					3	10.110.930	
6	01	01	09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	-	-	-	0	-					-	-	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10
6	01	01	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	10.000.000	-	-	0	435.000					-	435.000	
6	01	01	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	3.000.000	-	-	3	1.315.000					3	1.315.000	
6	01	01	09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	-	-	-	-	-					-	-	
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan		77	520.000.000	0	-	34	103.199.400	0	-	0	-	34	103.199.400	
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut LHP (%)	77,00	35.000.000	0	-	9	12.534.400	0	-	0	-	9	12.534.400	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10
6	01	02	01		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal (Laporan)	67	275.000.000	0	-	33	93.064.400	0	-	0	-	33	93.064.400	
6	01	02	01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	12	75.000.000	-	-	2	3.040.000					2	3.040.000	
6	01	02	01	02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6	50.000.000	-	-	6	19.800.000					6	19.800.000	
6	01	02	01	03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	7	25.000.000	-	-	3	12.350.000					3	12.350.000	
6	01	02	01	04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	7	20.000.000	-	-	3	9.900.000					3	9.900.000	
6	01	02	01	05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	5	70.000.000	-	-	10	35.440.000					10	35.440.000	
6	01	02	01	07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	30	35.000.000	-	-	9	12.534.400					9	12.534.400	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10
					Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)													
6	01	02	02		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10	245.000.000	0	-	1	10.135.000	0	-	0	-	1,00	10.135.000	
6	01	02	02	01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah (Laporan)	3	65.000.000	-	-	0	3.735.000					-	3.735.000	
6	01	02	02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	7	180.000.000	-	-	1	6.400.000					1	6.400.000	
6	1	3			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		33	96.450.000	0	-	16	18.370.000	0	-	0	-	16	18.370.000	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8	10	
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
						Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)	50	55.000.000	0	-	16	18.370.000	0	-	0	-	16	18.370.000,00	
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	1	26.450.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
6	01	03	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	3	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10
6	01	03	01	01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	15.000.000	-	-		-					-	-	
6	01	03	02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)	30	81.450.000	0	-	16	18.370.000	0	-	0	-	16	18.370.000	
6	01	03	02	01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	8	20.000.000	-	-	3	6.540.000					3	6.540.000	
6	01	03	02	02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	8	15.000.000	-	-	11	3.360.000					11	3.360.000	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 yang Dievaluasi		UNIT PD
									I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8	10	
6	01	03	02	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6	26.450.000	-	-	0	-					-	-	
6	01	03	02	04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	8	20.000.000	-	-	2	8.470.000					2	8.470.000	

Rencana Kerja (renja) Tahun 2024 memuat 3 program , 12 kegiatan dan 49 sub kegiatan serta pagu anggaran sebesar Rp.4.630.082.370. Realisasi capaian kinerja dan anggaran masing-masing program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan total dana sebesar Rp.4.013.632.370,-Realisasi anggaran mencapai Rp1.805.852.5,-(45,0%). Sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 34,55% .

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.35.000.000,- realisasi anggaran mencapai Rp.12.534.400,-(35,8%). Sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 11,69%.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.96.450.000,-Realisasi anggaran mencapai Rp.18.370.000 (19,05%). Sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 48,48%.

Dengan demikian capaian kinerja program sampai dengan triwulan II adalah sebesar 93,10% dengan realisasi anggaran sebesar 991.482.876,- (21,41%).

Rendahnya tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yang menjadi penghambat. Ada beberapa permasalahan dan solusi dapat kami gambarkan sebagai berikut :

- a. Jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi ruang lingkup tanggungjawab pengawasan tidak sebanding dengan jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas) ketersediaan sumber daya APIP yang ada.

Solusi yang ditempuh adalah mengusulkan penambahan jumlah tenaga fungsional Pengawasan (Auditor maupun PPUPD), dan meningkatkan kapasitas tenaga fungsional melalui bimtek dan pelatihan teknis.

- b. Sarana dan prasarana serta fasilitas berupa gedung kantor dan peralatan kantor lainnya (laptop dan printer) yang kurang memadai.

Solusi yang ditempuh adalah :

- Melakukan merenovasi ruangan yang ada untuk bisa digunakan.
- Mengusulkan pembangunan / pengadaan gedung kantor yang baru

- Merencanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada table II.2 berikut ini.

Tabel II.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Level Kapabilitas APIP		✓	3	3	4	4	3			
II	Maturitas SPIP		✓	2	2	3	4	2			
III	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan		✓	35.7	40.82	45.92	51.02	55.68			
IV	Tindak Lanjut LHP		✓	65.20	75.00	77.00	80.00	38.87	45.92	51.02	

Data pada tabel diatas menggambarkan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Level Kapabilitas APIP Tahun 2023 mencapai 3 dari target 3
2. Maturitas SPIP Tahun 2023 mencapai 2 dari target 2
3. Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Tahun 2023 mencapai 55,68% dari target 35,71%
4. Tindak Lanjut LHP Tahun 2023 mencapai 38,87% dari target 65,20%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Kabupaten Flores Timur diantaranya :

- 1) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengacu pada misi ke 5 untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berdasarkan pada Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga mengacu kepada agenda Strategis Nasional Reformasi Birokrasi Aparatur Negara yaitu :

- a. Penataan kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah
- b. Penyederhanaan ketatalaksanaan harus mendorong pelayanan terpadu, sistem, mekanisme dan prosedur.
- c. Kepegawaian berbasis kinerja harus dibangun, meliputi perencanaan kepegawaian yang menyangkut formasi, analisis jabatan, organisasi dan beban kerja, nomenklatur jabatan fungsional, standar kompetensi, kompetitif dan penempatan pegawai;
- d. Mengembangkan SAKIP, peningkatan komitmen pimpinan dalam menerapkan SAKIP, penentuan target dan indikator kinerja
- e. Pelayanan publik, kelembagaan pelayanan satu atap yang menyangkut landasan hukum, kewenangan dan mekanisme
- f. Pengembangan sistem pengawasan nasional secara berjenjang
- g. Pengembangan budaya kerja aparatur negara dan pementapan karakter dan jatidiri aparat yang jujur, disiplin, transparan, akuntabel, profesional, netral, sejahtera, berkinerja produktif dan berakhlak mulia.

- 2) Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Beberapa langkah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam rangka mendukung upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi, antara lain dengan menetapkan Wilayah Bebas Korupsi pada SKPD

secara bertahap dan melaksanakan Pakta Integritas, Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi serta Kegiatan Saber Pungli pada Organisasi Perangkat Daerah dan pada Tempat – tempat Pelayanan Umum.

Upaya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi senantiasa terus dilakukan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Stranas PPK) dan sebagai implementasinya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, dilakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun. Inspektorat juga melakukan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur selaku lembaga pengawas internal pemerintah, berperan dalam mendorong upaya pencegahan pemberantasan korupsi dengan melakukan MONEV terhadap rencana aksi dimaksud. Selain itu Inspektorat sejak tahun 2023 mulai melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibagi menurut wilayah binaan 5 (Lima) Inspektur Pembantu.

1) Peningkatan Opini Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam hal Akuntabilitas Keuangan Daerah, menunjukkan kinerja sudah sangat memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, Tahun 2022 Tahun 2023.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Sesuai dengan rancangan Awal Renja, pada Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Daerah akan melaksanakan 3 Program dengan 11 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.630.082.370,- setelah melalui analisis kebutuhan dan yang disesuaikan dengan

ketersediaan anggaran, maka pada Renja tahun 2024 total alokasi dana untuk membiayai program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 5.749.317.650,-

Rincian alokasi belanja per Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Rancangan Awal Renja dan Hasil analisis kebutuhan sebagaimana pada berikut :

Tabel II. 3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Flores Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inspektorat Daerah				4.630.082.370					5.749.317.650	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.013.632.370	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.984.392.655	
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		
			Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100				Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100		
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		
	Perencanaan Penganggaran dan		Jumlah Dokumen Perencanaan		47.500.000	Perencanaan Penganggaran dan		Jumlah Dokumen Perencanaan		51.798.310	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersedia</i>			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersedia</i>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3	14.999.790	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD</i>	2	7.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD</i>	2	9.999.500	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6	15.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6	11.800.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat</i>	4	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat</i>	4	14.999.020,	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<i>Daerah</i>					<i>Daerah</i>			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Jumlah dokumen / laporan penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah</i>		3.656.732.370	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Jumlah dokumen / laporan penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah</i>		4.603.529.827	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	44/14	3.577.732.370	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	44/14	4.553.729.827	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		<i>Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12	79.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		<i>Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12	49.800.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang OPD</i>		12.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang OPD</i>		27.884.115	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		<i>Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1	3.000.000,	Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		<i>Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1	9.999.675	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		<i>Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan</i>	2	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		<i>Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan</i>	2	7.884.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pada SKPD		<i>Barang Miliki Daerah pada SKPD</i>			pada SKPD		<i>Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD</i>			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2	4.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1	9.999.690	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Prosentase terpenuhinya unsur kapabilitas APIP</i>		55.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Prosentase terpenuhinya unsur kapabilitas APIP</i>		54.090.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		<i>Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	4	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		<i>Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1	5.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	4	5.000.000,	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	2	8.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	3	40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan</i>	1	70.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								<i>Pelatihan</i>			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –Undangan		<i>Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan</i>	-	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –Undangan		<i>Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan</i>	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Barang, Dokumen dan Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang disediakan</i>		85.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Barang, Dokumen dan Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang disediakan</i>		134.194.278	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	2	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	2	1.996.813	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	2	7.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	1	6.998.250	
	Penyediaan peralatan		<i>Jumlah paket peralatan rumah tanga yang</i>	1	5.000.000	Penyediaan peralatan		<i>Jumlah paket peralatan rumah</i>	1	4.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	rumah tangga		<i>disediakan</i>			rumah tangga		<i>tanga yang disediakan</i>			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan</i>	5	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan</i>	5	14.999.775	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan</i>	1	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan</i>	1	14.999.880	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan.</i>	12	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan.</i>	12	1.199.880	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	45.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	11	89.999.680,	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan</i>		126.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan</i>		68.292.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<i>Pemerintah Daerah</i>					<i>Pemerintah Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12	1.200.000,	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12	1.197.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik yang disediakan</i>	12	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik yang disediakan</i>	12	34.895.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</i>	12	90.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</i>	12	32.200.000,	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah unit barang Milik Daerah yang dipelihara</i>		31.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah unit barang Milik Daerah yang dipelihara</i>		44.604.125	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan		<i>Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar</i>	12	18.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan		<i>Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara</i>	12	27.928.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinas operasional atau lapangan		<i>pajak dan perizinannya.</i>			Kendaraan Dinas operasional atau lapangan		<i>dan dibayar pajak dan perizinannya.</i>			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi</i>	1	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi</i>	1	9.976.125	
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara</i>	5	3.000.000	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara</i>	13	6.700.000	
	Inspektorat Daerah				616.450.000	Inspektorat Daerah				764.924.995	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan		<i>Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (%)</i>	77	520.000.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan		<i>Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (%)</i>	77	567.368.670	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		<i>Jumlah Laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>		275.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		<i>Jumlah Laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>		283.923.670	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	12	75.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	13	81.774.700	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	6	50.000.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	7	62.639.850	
	Reviu Laporan Kinerja		<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>	7	25.000.000	Reviu Laporan Kinerja		<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>	5	24.999.500	
	Reviu Laporan Keuangan		<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>	7	20.000.000	Reviu Laporan Keuangan		<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>	5	19.999.660	
	Pengawasan Desa		<i>Jumlah Laporan Hasil pengawasan desa</i>	5	70.000.000	Pengawasan Desa		<i>Jumlah Laporan Hasil pengawasan desa</i>	20	61.162.460	
	Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	30	35.000.000	Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	16	33.347.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dengan Tujuan Tertentu</i>		245.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dengan Tujuan Tertentu</i>		283.445.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani</i>	3	65.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani</i>	2	37.760.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	7	180.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	13	245.685.000	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)</i>	3	96.450.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)</i>	3	197.556.325	
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi</i>	50				<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi (Pemerintah</i>	50		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<i>Birokrasi) (Perangkat Daerah)</i>					<i>Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)</i>			
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan)</i>	1				<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan)</i>	1		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>		15.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>		14.999.400	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>	3	15.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>	3	14.999.400	
	Pendampingan dan Asistensi		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang</i>		81.450.000	Pendampingan dan Asistensi		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang</i>		182.556.925	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<i>dilakukan pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)</i>					<i>dilakukan pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)</i>			
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	8	20.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	5	85.857.705	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	8	15.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	5	39.999.790	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan		<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan</i>	6	26.450.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan		<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi</i>	6	36.699.980	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Korupsi		<i>Korupsi</i>			Korupsi		<i>Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>			
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	8	20.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	8	19.999.450	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai hasil musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) tahun 2024, tidak ada usulan masyarakat berkaitan dengan program/kegiatan pengawasan yang ditujukan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Belanja SKPD Tahun 2024

Belanja SKPD dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.5.753.241.175,- mengalami penambahan (bertambah) sebesar Rp.1.123.158.805,- (24,25%) dari Rencana Kerja (Renja) Mumi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.630.082.370,- terdiri dari :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dianggarkan sebesar Rp.4.994.660.335,- atau bertambah sebesar Rp.981.027.965,- (24,44%) dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.4.013.632.370,-
2. **Program Penyelenggaraan Pengawasan.** dianggarkan sebesar Rp.561.024.940,- atau bertambah sebesar Rp.41.024.940,- (7,89%) dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 520.000.000,-
3. **Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi** dianggarkan sebesar Rp.197.555.900,- atau bertambah sebesar Rp101.105.900,- (1,04%) dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.96.450.000,-

Alokasi anggaran belanja pada program 2 dan rogram 3 untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengawasan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Adapun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 terinci dalam Tabel 3.1

Tabel III.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
6	1				Inspektorat Daerah		4.630.082.370			5.753.241.175		1.123.158.805			
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.013.632.370		100	4.994.660.335		981.027.965		Penju njang Priori tas
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
						Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100			100					
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
6	01	01	2		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan		47.500.000			51.798.310		4.298.310		PP

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
					Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja yang tersedia (dokumen)									
6	01	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(dokumen)	2	15,000,000	Larantuka OPD, Kab. Flores Timur	2	14.999.790	Larantuka OPD, Kab. Flores Timur	4,999,850	Pajak Bahan Bakar Kendar aan Bermot or (PBBK B)	PP
6	01	01	2	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD(dokumen)	2	7.500.000	Larantuka OPD, Kab. Flores Timur	2	9.999.500	Larantuka OPD, Kab. Flores Timur	2.499.500	Pajak Bahan Bakar Kendar aan Bermot or (PBBK B)	PP
6	01	01	2	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	6	15.000.000	Larantuka OPD, Kab. Flores Timur	6	11.800.000	Larantuka OPD, Kab. Flores Timur	(3.200.000)	Pajak Bahan Bakar Kendar aan Bermot or	PP

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
						Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)								(PBBK B)	
6	01	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (laporan)	4	10,000,000	Larantuka OPD, Kab. Flores Timur	4	14.999.020	Larantuka OPD, Kab. Flores Timur	4.999.020	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBK B)	PP
6	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen / laporan penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah (dokumen)		3.656.732.370			4.614.029.827		957.297.457		PP
6	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	44/14	3.577.732.370	Larantuka OPD, Kab. Flores Timur	44/14	4.564.229.827	Larantuka OPD, Kab. Flores Timur	986.497.457	APBD II (DAU)	PP

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
6	01	01	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	79.000.000	Larantuka	12	49.800.000	Larantuka	(29.200.000)	Dana Transfer Umum -DAU	PP
6	01	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang OPD(laporan)	-	12.000.000			27.884.115				PP
6	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD(Dokumen)	1	3.000.000	Larantuka	1	Rp9.999.675	Larantuka	6.999.675	Dana Transfer Umum -DAU	PP
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD(laporan)	2	5.000.000	Larantuka	2	Rp7.884.750	Larantuka	2.884.750	Dana Transfer Umum -DAU	PP
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)	5	4.000.000	Larantuka	1	Rp9.999.690	Larantuka	5.999.690	Dana Transfer Umum -DAU	PP

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya unsur kapabilitas APIP (%)		55.000.000			54.090.000		(910.000)		
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	4	10.000.000	Larantuk a	1	Rp4.960.000	Larant uka	(5.040.000)	Dana Transf er Umum -DAU	PP
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	4	5.000.000	Larantuk a	2	Rp9.820.000	Larant uka	4.820.000	Dana Transf er Umum -DAU	PP
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	3	40.000.000	Larantuk a	1	Rp39.310.000	Larant uka	(690.000)	Dana Transf er Umum -DAU	PP

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang, Dokumen dan Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang disediakan(unit)		85.200.000			109.194.278		23.994.278	Dana Transf er Umum -DAU	PP
6	01	01	2.1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang disediakan(Paket)	2	2.000.000	Larantuk a	2	Rp1.996.813	Larant uka	(3.187)	Dana Transf er Umum -DAU	PP
6	01	01	2.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2	7.000.000	Larantuk a	1	Rp6.998.250	Larant uka	(1.750)	Dana Transf er Umum -DAU	PP
6	01	01	2.1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	1	5.000.000	Larantuk a	1	Rp4.000.000		(1.000.000)	Dana Transf er Umum -DAU	PP

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
6	01	01	2.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan(Paket)	5	10.000.000	Larantuk a	5	Rp14.999.775	5	4.999.775	Dana Transf er Umum -DAU	
6	01	01	2.1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan(Paket)	1	15.000.000	Larantuk a	1	Rp14.999.880	1	(120)	Dana Transf er Umum -DAU	
6	01	01	2.1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan. (dokumen)	12	1.200.000	Larantuk a	12	Rp1.199.880	12	(120)	Dana Transf er Umum -DAU	
6	01	01	2.1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	45.000.000	Larantuk a	11	Rp64.999.680	11	19.999.680	Dana Transf er Umum -DAU	

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (laporan)		126.200.000			Rp91.292.000		(34.908.000)	Dana Transf er Umum -DAU	
6	01	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat(laporan)	12	1.200.000	Larantuk a	12	Rp1.197.000	Larant uka	(3.000)	Dana Transf er Umum -DAU	
6	01	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik yang disediakan(laporan)	12	35.000.000	Larantuk a	12	Rp34.895.000	Larant uka	(105.000)	Dana Transf er Umum -DAU	
6	01	01	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	12	90.000.000	Larantuk a	12	Rp55.200.000	Larant uka	(34.800.000)	Dana Transf er Umum -DAU	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan	Jumlah unit barang Milik Daerah yang		31.000.000			44.604.125		13.604.125		

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
					Pemerintah Daerah	dipelihara									
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya.(unit)	12	18.000.000	Larantuk a	12	Rp27.928.000	Larant uka	9.928.000	Dana Transf er Umum -DAU	PP
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi(unit)	1	10.000.000	Larantuk a	1	Rp9.976.125	Larant uka	(23.875)	Dana Transf er Umum -DAU	PP
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit)	8	3.000.000	Larantuk a	13	Rp6.700.000	Larant uka	3.700.000	Dana Transf er Umum -DAU	PP
6	1				Inspektorat Daerah			616.450.000			716.924.995		100.474.995		

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (%)		520.000.000			544.368.670		24.368.670	Dana Transf er Umum -DAU	TKP
6	01	02	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal		275.000.000			283.923.670		8.923.670	Dana Transf er Umum -DAU	TKP
6	01	02	2	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (laporan)	12	75.000.000	Larantuk a	13	Rp81.774.700	19 Keca matan	6.774.700	Dana Transf er Umum -DAU	TKP
6	01	02	2	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah(laporan)	6	50.000.000	Larantuk a	7	Rp62.639.850	Larant uka	12.639.850	Dana Transf er Umum -DAU	TKP
6	01	02	2	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja(laporan)	7	25.000.000	Larantuk a	5	Rp24.999.500	Larant uka	(500)	Dana Transf er Umum	TKP

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
														-DAU	
6	01	02	2	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan(laporan)	7	20.000.000	Larantuka	5	Rp19.999.660	Larantuka	(340)	Dana Transfer Umum -DAU	TKP
6	01	02	2	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil pengawasan desa(laporan)	5	70.000.000	Larantuka	20	Rp61.162.460	Larantuka	(8.837.540)	Dana Transfer Umum -DAU	TKP
6	01	02	2	07	Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (laporan)	30	35.000.000	Larantuka	16	Rp33.347.500	Larantuka	(1.652.500)	Dana Transfer Umum -DAU	TKP
6	01	02	2		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dengan Tujuan		245.000.000			260.445.000		15.445.000	Dana Transfer Umum	TKP

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
						<i>Tertentu(laporan)</i>								-DAU	
6	01	02	2	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani (laporan)</i>	3	120,000,000	Larantuka	3	45,000,000	Larant uka	(75,000,000)	APBD II (DAU)	
6	01	02	2	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu(laporan)</i>	7	202,940,000	Larantuka	8	409,263,950	Larant uka	206,323,950	APBD II (DAU)	
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)</i>	3	96.450.000		3	172.556.325		76.106.325	Dana Transf er Umum -DAU	PP
						<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi</i>	50			50					

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
						<i>Birokrasi) (Perangkat Daerah)</i>									
						<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan)</i>	1			1					
6	01	03	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>		15.000.000			14.999.400		(600)	Dana Transf er Umum -DAU	
6	01	03	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)</i>	3	15.000.000	Larantuk a	3	Rp14.999.400	Larant uka	(600)	Dana Transf er Umum -DAU	PP
6	01	03	2		Pendampingan dan Asistensi	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan</i>		81.450.000			157.556.925		76.106.925	Dana Transf er Umum	PP

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
						Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)								-DAU	
6	01	03	2	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)</i>	8	20.000.000	Larantuk a	5	Rp60.857.705	Larant uka	40.857.705	Dana Transf er Umum -DAU	PP
6	01	03	2	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)</i>	8	15.000.000	Larantuk a	5	Rp39.999.790	Larant uka	24.999.790	Dana Transf er Umum -DAU	PP
6	01	03	2	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan</i>	6	26.450.000	Larantuk a	6	Rp36.699.980	Larant uka	10.249.980	Dana Transf er Umum -DAU	PP

K0DE					URUSAN BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INSIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Ber tambah / (Ber kurang) Anggaran (Rp,-)	Sumber Dana	Periori tas Daera h
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-5)	(11)	(12)
						Pemberantasan Korupsi (kegiatan)									
6	01	03	2	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	8	20.000.000	Larantuk a	8	Rp19.999.450	Larant uka	(550)	Dana Transf er Umum -DAU	

BAB IV PENUTUP

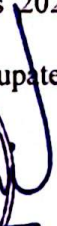
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras untuk pencapaian target pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan.

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur. Dalam rangka memaksimalkan capaian program/kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, 26 Agustus 2024

Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur, 



Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Muda
NIP. 19651023 199503 1 002



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR